

KONTRIBUSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS KOMUNITAS

Lisda Van Gobel¹, Octaviani Suryaningsih Masaguni²

Pascasarjana Universitas Bina Taruna Gorontalo

lisdavangobel69@gmail.com , octavianimasaguni93@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pendidikan kewarganegaraan terhadap kebijakan publik dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas. Pendidikan kewarganegaraan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peran serta mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya dalam pengelolaan sampah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik dengan triangulasi metode untuk menjamin validitas hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas, serta mendorong terciptanya kebijakan publik yang mendukung keberlanjutan pengelolaan sampah di tingkat lokal. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan dan berbasis pada partisipasi aktif masyarakat.

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Kebijakan Publik, Pengelolaan Sampah

ABSTRACT

This study aims to analyze the contribution of civic education to public policy in community-based waste management. Civic education is expected to raise public awareness about the importance of their role in maintaining environmental cleanliness, particularly in waste management. The research method used is qualitative with a case study approach, where data is collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation. The collected data is then analyzed using thematic analysis techniques with method triangulation to ensure the validity of the research findings. The results show that civic education plays a significant role in increasing community participation in community-based waste management and in promoting the creation of public policies that support the sustainability of waste management at the local level. This study contributes to the development of more sustainable waste management policies based on active community participation.

Keywords: Civic Education, Public Policy, Waste Management

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh

masyarakat modern, terutama di wilayah perkotaan yang memiliki tingkat produksi sampah yang tinggi. Kebijakan publik dalam pengelolaan sampah sering kali menghadapi kendala seperti kurangnya partisipasi masyarakat, minimnya kesadaran lingkungan, dan keterbatasan sumber daya pemerintah (Rahman & Putri, 2020). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mampu mengintegrasikan partisipasi aktif warga dengan pelaksanaan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan strategis yang dapat diambil adalah melalui pendidikan kewarganegaraan.

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membangun kesadaran kolektif dan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung kebijakan publik. Dengan mempromosikan nilai-nilai kewarganegaraan seperti tanggung jawab sosial, kepedulian lingkungan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan, pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas (Yusuf et al., 2019). Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat dari kebijakan publik, tetapi juga berperan sebagai mitra aktif dalam implementasi dan pengawasan program pengelolaan sampah.

Dalam konteks administrasi publik, sinergi antara pendidikan kewarganegaraan dan kebijakan publik membuka peluang untuk menciptakan tata kelola yang lebih inklusif dan partisipatif (Sari & Nugroho, 2021). Pendidikan kewarganegaraan dapat membantu meningkatkan literasi kebijakan masyarakat, sehingga mereka mampu memahami, mendukung, dan bahkan mengkritisi kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Hal ini dapat meminimalisasi kesenjangan antara perencanaan kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan, terutama dalam isu-isu lingkungan seperti pengelolaan sampah.

Di tingkat komunitas, pendidikan kewarganegaraan mendorong terbentuknya inisiatif lokal seperti bank sampah, program daur ulang, dan pengelolaan limbah berbasis rumah tangga. Inisiatif-inisiatif ini tidak hanya mendukung kebijakan publik dalam mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir), tetapi juga menciptakan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui pengelolaan sampah yang

bernilai ekonomis (Widodo & Harahap, 2022). Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan menjadi katalisator bagi terciptanya masyarakat yang lebih sadar lingkungan dan berdaya dalam mendukung kebijakan pengelolaan sampah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kontribusi pendidikan kewarganegaraan terhadap kebijakan publik dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas. Dengan memahami peran pendidikan kewarganegaraan, diharapkan dapat ditemukan strategi yang lebih efektif untuk mengintegrasikan nilai-nilai kewarganegaraan dalam pelaksanaan kebijakan publik yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap berbagai tantangan pengelolaan sampah, sekaligus membangun masyarakat yang lebih peduli terhadap lingkungan dan aktif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam kontribusi pendidikan kewarganegaraan terhadap kebijakan publik dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas. Lokasi penelitian difokuskan pada komunitas yang telah mengimplementasikan program pengelolaan sampah berbasis partisipatif.

Subjek penelitian meliputi warga komunitas, tokoh masyarakat, pengelola program pengelolaan sampah, serta pejabat pemerintah yang terkait. Lokasi penelitian dipilih secara purposive berdasarkan keberhasilan program pengelolaan sampah komunitas yang relevan dengan fokus penelitian.

Dalam penelitian ini, tiga teknik pengumpulan data utama digunakan untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai pengelolaan sampah berbasis komunitas. Pertama, wawancara mendalam dilakukan dengan subjek utama, seperti pengelola program dan anggota komunitas, untuk menggali pengalaman, pandangan, dan peran mereka dalam pengelolaan sampah. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai pemahaman dan sikap individu

terhadap pengelolaan sampah serta tantangan yang mereka hadapi dalam pelaksanaannya. Kedua, observasi partisipatif dilakukan untuk memungkinkan peneliti terlibat langsung dalam kegiatan komunitas, yang memberikan kesempatan untuk mengamati secara langsung bagaimana program pengelolaan sampah dilaksanakan, serta bagaimana interaksi antar anggota komunitas dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut. Ketiga, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis, seperti laporan, kebijakan, dan dokumen resmi yang terkait dengan program pengelolaan sampah. Dokumen-dokumen ini memberikan gambaran mengenai dasar hukum, kebijakan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program.

Untuk menganalisis data yang terkumpul, digunakan teknik analisis tematik. Proses ini melibatkan pengkodean data yang telah diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta identifikasi tema-tema utama yang muncul dalam data. Setelah tema-tema ini diidentifikasi, peneliti melakukan interpretasi untuk memahami makna yang lebih dalam dan mengaitkan temuan dengan tujuan penelitian. Validitas data dijamin melalui triangulasi metode, di mana data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi saling dikroscek untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi. Selain itu, diskusi dengan pakar juga dilakukan untuk memperkuat keandalan analisis, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan kontribusi yang lebih bermakna dalam kajian pengelolaan sampah berbasis komunitas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan sampah berbasis komunitas merupakan pendekatan yang semakin mendapat perhatian karena keterlibatan langsung masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat menghasilkan solusi yang lebih berkelanjutan dan efisien. Dalam konteks ini, pendidikan kewarganegaraan memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk kesadaran sosial dan lingkungan masyarakat. Melalui pendidikan kewarganegaraan, individu tidak hanya diajarkan tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, tetapi juga diberikan pemahaman tentang pentingnya peran serta mereka dalam menjaga kelestarian lingkungan, termasuk dalam hal pengelolaan sampah. Hasil penelitian ini

mengungkapkan sejauh mana kontribusi pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter masyarakat yang peduli terhadap lingkungan, serta bagaimana hal ini berpengaruh pada kebijakan publik yang mendukung pengelolaan sampah berbasis komunitas.

Hasil

1. Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Landasan Kesadaran Lingkungan

Pendidikan kewarganegaraan memainkan peran sentral dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Pendidikan ini mengajarkan nilai-nilai tanggung jawab sosial yang lebih luas, termasuk kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Dalam konteks pengelolaan sampah berbasis komunitas, pendidikan kewarganegaraan berfungsi untuk mengedukasi masyarakat agar memiliki kesadaran kolektif dalam menjaga kebersihan lingkungan, mulai dari meminimalisir sampah hingga cara memilah dan mendaur ulang sampah.

Melalui pendidikan kewarganegaraan, generasi muda diajarkan untuk bertindak sebagai agen perubahan yang tidak hanya berfokus pada kepentingan pribadi tetapi juga kepentingan bersama, termasuk dalam menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Dengan demikian, masyarakat yang memperoleh pendidikan kewarganegaraan yang baik akan lebih mudah memahami pentingnya pengelolaan sampah berbasis komunitas yang mengutamakan prinsip-prinsip keberlanjutan. Selain itu, nilai-nilai yang ditanamkan melalui pendidikan kewarganegaraan akan meningkatkan kepedulian individu terhadap dampak sampah terhadap lingkungan, yang dapat merangsang perilaku lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah.

2. Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Kebijakan Publik

Pendidikan kewarganegaraan yang baik dapat menciptakan masyarakat yang sadar akan hak dan kewajiban mereka dalam konteks sosial dan lingkungan. Masyarakat yang teredukasi akan lebih aktif dalam mendukung kebijakan publik

yang berfokus pada pengelolaan sampah berbasis komunitas. Sebaliknya, kebijakan publik yang dirancang untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah akan lebih mudah diterima jika masyarakat memiliki pemahaman yang cukup tentang pentingnya kebijakan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang memadai dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Masyarakat yang paham akan hak dan kewajiban mereka dalam konteks kebijakan lingkungan akan lebih mendukung inisiatif yang mendorong pengurangan sampah dan pengelolaan sampah secara mandiri. Selain itu, pemahaman yang lebih baik mengenai dampak negatif sampah bagi lingkungan akan meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan yang ada, seperti program daur ulang dan pemilahan sampah. Oleh karena itu, pemerintah perlu melibatkan pendidikan kewarganegaraan dalam setiap langkah perumusan kebijakan publik terkait pengelolaan sampah.

3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

Masyarakat yang teredukasi dengan baik melalui pendidikan kewarganegaraan akan lebih memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, termasuk dalam pengelolaan sampah. Salah satu indikator keberhasilan pengelolaan sampah berbasis komunitas adalah tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah, seperti pemilahan sampah, daur ulang, dan pengurangan sampah. Pendidikan kewarganegaraan dapat menumbuhkan rasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap lingkungan, sehingga mendorong individu untuk terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Partisipasi masyarakat yang lebih tinggi dalam pengelolaan sampah dapat membantu mengurangi beban pemerintah dalam menangani sampah, sekaligus meningkatkan efektivitas kebijakan publik di tingkat lokal. Program-program seperti bank sampah atau sistem pengelolaan sampah berbasis swadaya dapat berjalan dengan baik jika masyarakat terlibat aktif dalam pelaksanaannya. Ini

menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan tidak hanya berperan dalam pembentukan wawasan, tetapi juga dalam menciptakan perubahan perilaku yang lebih baik di tingkat komunitas.

Pembahasan

Setelah memaparkan hasil yang menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki peran signifikan dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas, penting untuk membahas lebih lanjut bagaimana pendidikan ini dapat membentuk perilaku sosial yang mendukung kebijakan publik. Pembahasan ini akan mengkaji lebih dalam tentang bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi pilar dalam pembentukan karakter yang peduli terhadap lingkungan dan bertanggung jawab atas pengelolaan sampah. Selain itu, akan dibahas pula sinergi antara kebijakan publik dan inisiatif masyarakat dalam menciptakan solusi pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Pembahasan ini juga akan menyoroti tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan nilai-nilai kewarganegaraan dengan praktik pengelolaan sampah di tingkat komunitas, serta peran pemerintah dalam mendukung upaya tersebut.

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan perilaku warga negara, termasuk dalam hal kepedulian terhadap pengelolaan sampah. Dengan membangun karakter yang peduli terhadap lingkungan, pendidikan kewarganegaraan membantu menciptakan masyarakat yang lebih bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah di lingkungan mereka. Di Indonesia, kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang ada sudah mencakup berbagai topik tentang hak dan kewajiban warga negara, serta pentingnya menjaga kelestarian alam. Namun, masih banyak yang perlu dilakukan untuk mengintegrasikan lebih banyak materi tentang pengelolaan sampah dan keberlanjutan lingkungan dalam pendidikan ini.

Jika pendidikan kewarganegaraan dapat lebih fokus pada pengelolaan sampah dan pengembangan nilai-nilai keberlanjutan, maka generasi muda akan lebih siap untuk menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks. Selain itu, pendidikan ini juga harus melibatkan berbagai pihak, seperti sekolah, masyarakat, dan pemerintah, untuk

memastikan bahwa pesan-pesan lingkungan yang diajarkan dapat diterima dan dipraktikkan secara nyata.

Pemerintah memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pengelolaan sampah berbasis komunitas. Kebijakan publik yang mendukung inisiatif masyarakat, seperti pemberian insentif atau penghargaan bagi komunitas yang berhasil mengelola sampah dengan baik, akan mendorong lebih banyak masyarakat untuk terlibat. Dalam hal ini, pendidikan kewarganegaraan dapat membantu memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam kebijakan pemerintah dan program pengelolaan sampah.

Pendidikan kewarganegaraan yang efektif juga dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat yang teredukasi dengan baik akan lebih mudah menerima kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, karena mereka memahami alasan dan tujuan dari kebijakan tersebut. Selain itu, kebijakan yang ada perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat lokal, agar dapat diterima dengan baik dan diimplementasikan secara efektif. Agar pengelolaan sampah berbasis komunitas dapat berjalan dengan baik, perlu ada sinergi yang kuat antara pendidikan kewarganegaraan, kebijakan publik, dan praktik langsung di lapangan. Pendidikan kewarganegaraan harus mampu membentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah, kebijakan publik harus mendukung inisiatif-inisiatif lokal yang berkelanjutan, dan masyarakat harus terlibat aktif dalam praktik pengelolaan sampah di tingkat komunitas.

Pengelolaan sampah berbasis komunitas yang sukses membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah harus menyediakan fasilitas dan insentif untuk mendukung pengelolaan sampah di tingkat lokal, sementara masyarakat harus dilibatkan dalam setiap langkah implementasi kebijakan. Dengan demikian, pengelolaan sampah akan menjadi lebih efektif dan berdampak positif bagi lingkungan.

SIMPULAN

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengelolaan sampah berbasis komunitas. Melalui pendidikan ini, masyarakat tidak hanya diberi pemahaman mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, tetapi juga dibekali dengan nilai-nilai penting terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pendidikan kewarganegaraan yang efektif dapat membentuk karakter individu yang lebih peduli terhadap keberlanjutan dan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang teredukasi dengan baik dalam bidang kewarganegaraan cenderung lebih aktif dalam berpartisipasi dalam program-program pengelolaan sampah berbasis komunitas. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan berkontribusi dalam mendorong terciptanya kebijakan publik yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Kebijakan yang mendukung inisiatif lokal dan mendorong partisipasi aktif masyarakat akan mempercepat pencapaian tujuan pengelolaan sampah yang efisien dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi antara pendidikan kewarganegaraan, kebijakan publik, dan praktik pengelolaan sampah berbasis komunitas sangatlah penting untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya peduli terhadap kebersihan lingkungan, tetapi juga bertanggung jawab dalam mewujudkan keberlanjutan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anggraeni, S. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan di Era Globalisasi: Tantangan dan Solusi*. Malang: UMM Press.
- [2] Darmadi, R. (2020). *Pendidikan Kewarganegaraan: Konsep, Tujuan, dan Implementasinya dalam Membangun Karakter Bangsa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [3] Haryadi, R. (2021). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah: Studi Kasus di Kota Jakarta*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- [4] Hartati, S. (2019). *Pendidikan Lingkungan dan Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas: Teori dan Praktik*. Bandung: Alfabeta.
- [5] Junaidi, A., & Suryani, N. (2020). "Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Kepedulian Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 18(1), 22-35.
- [6] Koesrini, T. (2021). "Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Katalisator Perubahan Sosial dalam Pengelolaan Sampah." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 17(3), 95-108.
- [7] Kurniawan, F., & Prabowo, E. (2021). "Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pengelolaan Sampah." *Jurnal Pendidikan dan Sosial*, 12(3), 45-60.
- [8] Nugroho, A., & Wijaya, R. (2020). "Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis

- Komunitas: Pendekatan Partisipatif dan Strateginya." *Jurnal Kebijakan Lingkungan*, 13(1), 71-84.
- [9] Rahmawati, L., & Wulandari, A. (2020). "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas di Kabupaten Bogor." *Jurnal Pemerintahan dan Pembangunan*, 7(2), 55-70.
- [10] Satria, M. (2018). *Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas: Pendekatan Partisipatif untuk Lingkungan yang Berkelanjutan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [11] Setiawan, B., & Prasetyo, I. (2022). "Integrasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pengelolaan Sampah: Perspektif Masyarakat Kota." *Jurnal Pendidikan Lingkungan*, 9(4), 120-135.
- [12] Sari, D. (2019). *Masyarakat dan Kebijakan Lingkungan: Studi Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bandung*. Bandung: Pustaka Setia.
- [13] Sumadi, W. (2022). "Sinergi Pendidikan Kewarganegaraan dan Kebijakan Publik dalam Pengelolaan Sampah di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(2), 101-120.
- [14] Yuliana, R. (2023). *Kebijakan Publik dan Pengelolaan Sampah: Studi Kasus di Kota-Kota Besar Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- [15] Zulkarnain, A., & Iskandar, M. (2017). *Masyarakat dan Lingkungan: Peran Pendidikan dalam Pengelolaan Sampah*. Makassar: Universitas Hasanuddin Press.